

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutang Piutang Suami Atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

1. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian hutang menurut etimologi ialah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²² Yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih orang).²³

Sedangkan yang dimaksud dari hutang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.²⁴

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapakan suatu prestasi dari seseorang yang lain.²⁵

²² Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1256.

²³ Ibid, 1256.

²⁴ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 399.

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), 1.

Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (kreditur) dengan orang yang diberi hutang (debitur).²⁶

Dari uraian di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Adapun Dasar hukum mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian hutang piutang diatur pada Pasal 1320-Pasal 1337 KUHPerdata, Bagian Kedua dalam Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bersama, diperlukan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu; dan
- d. suatu sebab yang halal.

²⁶ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 307.

Perjanjian dapat mengalami pembatalan apabila suatu Perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota.

Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

1. *Null and Void*

Dari awal Perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi, sehingga Perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

2. *Voidable*

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, Perjanjian tidak berarti batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan Perjanjian tersebut kepada hakim. Adapun pihak yang berhak untuk meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Apabila pihak tersebut belum mengajukan pembatalan kepada hakim, perjanjian tetap mengikat para pihak.

3. Syarat-syarat Perjanjian Hutang Piutang

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang Hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²⁷

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 225.

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.

Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan perjanjian misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.²⁸

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian itu lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut.²⁹

²⁸ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 12.

²⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 32.

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut. :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b. Orang-orang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:

- 1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- 2) Seseorang dewasa yang boros (pasal; 433 KUH perdata).

c. Perempuan yang telah kawin

Menurut pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (pasal 1467 KUH perdata).

3. Mengenai Suatu Hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, adalah isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.³⁰

³⁰ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), 147-148.

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (barden beding) yang diatur dalam pasal 1318 KUHPerdara.

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.³¹ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat'. Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan:

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³¹ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. Ke-18*, (Jakarta: pradnya Paramita, 1984), 547-548.

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.³² Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.³³

Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa ditempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan

³² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia, Cet Ke-1*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 125-126.

³³ Ibid., 127.

secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwasuami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Sedangkan pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.³⁴

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, 24-28.

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah-tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan anak.
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.

- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyus.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang, yaitu:

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.
- e. Agar tidak dianggap nusyuz maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu istri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

5. Penyelesaian Hutang Piutang

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak yang berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berhutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokok hutang itu harus ditagih dahulu. Biasanya peringatan (*somasi*) itu dilakukan tiga kali, hal ini dilakukan oleh seseorang jurusita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai mudah dipungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis (pasal 1238 BW), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai. Dalam hal ini meskipun

prestasi itu dilakukan oleh si berhutang , tetapi karena tidak menurut perjanjian, maka prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu kelalaian. Adakalanya, dalam berkontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana saja si berhutang dapat dianggap lalai. Disini tidak memerlukan *somasi* atau peringatan.

Hak yang diberikan oleh pasal 1266 B.W yang menentukan bahwa setiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim di Pengadilan.

Dalam hubungan ini, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat *constitutief* dan tidak *declaratoir*. Malahan hakim mempunyai suatu kekuasaan *discretionair*, artinya ia berwenang untuk menentukan wanprestasi debitur. Apabila kelalaiannya itu dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluluskan.³⁵ Hal ini mengacu pada implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian sah menurut pasal 1320 KUHPerdato.³⁶

Tentu saja kedua belah pihak debitur dan kreditur dapat juga mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diucapkan oleh hakim yaitu dengan jalan perdamaian atau bermusyawarah, sehingga dengan sendirinya akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

³⁵ Ikahi, *Varia Peradilan* (Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308 Juli 2011), 71.

³⁶ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, 148.

Dalam hal ini persoalan mengenai pembebanan hutang piutang yang dibuat suami atau istri selama perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) hal : yaitu Kewajiban memikul (*draagplicht*) dan tanggung gugat (*aansprakelijkheid*).

Kewajiban memikul merupakan sesuatu yang mengenai hubungan intern antara suami atau istri yang mengarah pada siapakah yang harus memikul pelunasan hutang itu atau bagian siapakah yang harus dikurangi untuk melunasi hutang tersebut. Tentunya yang harus memikul adalah orang yang menikmati manfaatnya.

Soal kewajiban memikul akan muncul manakala diadakan pembagian harta kekayaan antara suami istri. Pada hakikatnya kewajiban memikul itu merupakan soal pembagian (*contribution*), sedang tanggung gugat adalah soal perjanjian (*obligation*). Soal tanggung gugat lebih sukar dari pada kewajiban memikul.

Tanggung gugat antara suami istri hanyalah ada selama terdapat persatuan harta kekayaan antara mereka berdua. Selama perkawinan terdapat tiga buah macam harta perkawinan :

1. Harta kekayaan istri pribadi
2. Harta kekayaan suami pribadi
3. Persatuan harta kekayaan antara suami istri.

Mengenai pembebanan terhadap harta pribadi maka pihak yang tidak membuat hutang terdapat 3 pendapat. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo⁶ bahwasanya harta pribadi yang tidak berhutang dapat saja dibebani hutang

bersama atau hutang persatuan (*gemeenschap*). Menurut Pitlo menyatakan sebaliknya dengan mengajukan dua buah alasan ini :

1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang kepailitan mengatur bahwa dalam hal suami jatuh pailit maka istrinya dapat mengajukan gugatan berdasarkan hak pribadinya (*persoonlijke recht*);
2. Perlunya pasal yang mengatur tentang persatuan harta kekayaan apabila harta pribadi istri akan juga dibebani hutang persatuan yang dibuat oleh suami.³⁷

Sedangkan menurut Subekti bahwasanya Hutang dalam perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hutang pribadi (hutang *prive*) dan hutang persatuan (hutang *gemeenschap*), yaitu suatu hutang untuk keperluan bersama). Untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat hutang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk hutang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat hutang itu disita pula. Dan ini dijelaskan dalam pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menerangkan :

Pasal 35 ayat 1 dan 2 menerangkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

³⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1982), 86.

Dan pasal 36 ayat 2 menerangkan bahwasanya:

Harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dasar ini diikuti pasal 31 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 ayat 1 dan 2 mengenai Hak dan kewajiban suami isteri yang menjelaskan bahwasanya :

1. Hak dan Kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengenai tentang pemecahan hutang *gemeenschap* yang paling sesuai dengan undang-undang Subekti berpendapat, suami selalu dapat dipertanggung jawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat oleh istrinya, tetapi si istri tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* yang diperbuat suaminya.³⁸

Dalam hal pertanggung jawaban terhadap hutang-hutang *gemeenschap* Pasal 130 dan 131 BW mengatur tentang tanggung gugat (*aansprakelijkheid*) atas hutang persatuan sesudah pembubaran persatuan harta kekayaan.

Dalam hal ini, hendaknya dapat diikuti beberapa buah asas ini :

1. Suami atau istri tetap harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuatnya sendiri;
2. Suami pun harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuat istrinya;
3. Istri pun dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-hutang yang telah dibuat oleh si suami.

³⁸ Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, 35.

4. Sesudah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik suami maupun istri tidak lagi dapat dipertanggung jawabkan atau dipertanggung gugatkan atas hutang yang dibuat oleh pihak yang lain sebelum adanya perkawinan, artinya hutang itu tetap membebani pihak yang membuat hutang itu sendiri atau ahli warisnya.³⁹

B. Hutang Piutang Suami Atau Istri Tanpa Sepengetahuan Pasangannya Menurut Hukum Islam.

1. Pengertian Hutang Piutang

Pengertian qard secara etimologi, berarti **نقطة** (potongan). Sedangkan menurut istilah, antara lain dikemukakan ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta misil (yang mempunyai perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya, dan atau akad tertentu membayarkan harta misil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian sesuatu dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang juga dapat berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁴¹

Orang yang berhutang adalah orang yang suatu ketika tidak punya uang, akan tetapi akan punya uang diwaktu lain, karena itu ia perlu berhutang dikala itu dan berjanji akan membayar hutangnya itu waktu lain, orang lain yang akan

³⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, 89.

⁴⁰ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 175.

⁴¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

menghutangkan uangnya pada seseorang artinya orang itu berpiutang pada orang yang berhutang itu.⁴²

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupannya dihari yang akan datang. Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan tersebut dapat berupa pinjaman atau hutang. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling menolong antar sesamanya. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt, dan Rasulnya-Nya yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini baik dalam ketentuan al Qur'an maupun ketentuan sunnah Rasul.

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang ini dapat dijumpai baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun al-hadis. Dalam ketentuan al-Qur'an disandarkan kepada anjuran Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu :

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ...,Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah: 2).⁴³

⁴² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 287.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

Dijelaskan dalam ayat lain juga surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....(QS. al-Baqarah: 282)⁴⁴

Sedangkan dasar hukum dalam hutang piutang dari hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Bersabda: barangsiapa menghilangkan suatu macam kesusahan dunia sesama muslim maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya dihari kiamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia didunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya.⁴⁵

Maksud hadis di atas hukum memberi hutang adalah sunah karena mengandung kebaikan yaitu bentuk tolong-menolong sesama muslim untuk meringankan dan melepaskan dari segala kesulitan ialah dengan hutang piutang, selain itu seorang muslim untuk menolong sesamanya, dengan jalan memberi hutang agar bisa keluar dari segala kesusahan.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

⁴⁵ Shadiqi Muhammad Jamil, *Sunan Abi Daud, Juz II*, (Beirut: Dar al Kutub al ilmiyah, t.t), 471.

Sayyid sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan untuk memberi hutang yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena ini mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta seperti sediakala.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat Perjanjian Hutang Piutang

a. Rukun Perjanjian Hutang Piutang

Adapun rukun syarat perjanjian hutang piutang adalah:⁴⁷

1. Adanya yang berpiutang, yang disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
2. Adanya orang yang berhutang, disyaratkan harus orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
3. Obyek/barang yang dihutangkan, yang disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur/diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlahnya/nilainya dengan jumlah/nilai barang yang diterima.
4. Lafaz yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang.⁴⁸

b. Syarat Perjanjian Hutang Piutang

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 139.

⁴⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, 175.

⁴⁸ Chairuman Pasaribu, et al, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 137.

Adapun persyaratan-persyaratan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, seseorang yang berhutang dan berpiutang boleh dikatakan sebagai subjek hukum sebab yang menjalankan kegiatan hutang piutang adalah orang yang berpiutang dan orang yang berhutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang mempunyai kecakapan adakalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (baligh) dimana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna, dan dia melakukan perbuatan tersebut tidak tergantung pada orang lain.

Sedangkan bagi mereka yang belum baligh, artinya masih kanak-kanak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, dimana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya.⁴⁹

Kedua, mengenai harta benda yang menjadi objek harus mal mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek hutang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanfiyah akad hutang piutang berlaku pada harta

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, Cet.II, 1983), 37.

benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan objek hutang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Ketiga, karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*) yang dibutuhkan adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berhutang (*lafaz*). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berhutang. Ijab dan qabul tidak harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang dihutangkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta itu rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiko ditanggung oleh pihak kedua, tetapi bila sebelum diterimanya oleh pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama.⁵⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya, dengan klasifikasi seperti berikut ini.

- a. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri
- b. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.

⁵⁰ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet.I, 2002), 37-38.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain,⁵¹ sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-quran dan beberapa hadits Nabi SAW. dalam Al-Quran, umpamanya pada surat al-baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS.al-baqarah: 228)⁵²

Dalam ayat ini, Al-qurthubi menafsirkan, "yakni para isteri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh keduanya.

a. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

⁵¹ Ali yusup As-Subki, *Fikih Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah 2010
Penerjemah : Nur Khozin, h.143

⁵² Departemen Agama RI, Op.Cit, h.28

Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri Isteri memiliki berbagai hak materi yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materi,yaitu ; hubungan baik,perlakuan yang baik,dan keadilan.

1. Kewajiban suami yang bersifat materi

a) Mahar

Perempuan diberikan hak mahar.dan suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang harus diberikan oleh suami,baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.

Sebagian madzhab hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan,⁵³ Allah SWT berfirman :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S.Al-Nisa : 4).⁵⁴

Maksudnya berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib,bukan pembelian atau ganti rugi,mahar ini

⁵³ Sayyid Sabiq,Op.Cit,Jilid 7,h.53

⁵⁴ Departemen Agama RI,Op.Cit,h.115

wajib diberikan kepada isteri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata “mahar” ini.

Segala dalil dan nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksud kecuali untuk menentukan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seseorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban baik sebagai seorang ibu, anak perempuan ataupun seorang isteri.⁵⁵

b) Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika suaminya seorang yang kaya. Memberi nafkah hukumnya wajib menurut Al-Quran, sunnah dan ijma.⁵⁶

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada isterinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya, isteri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, Jilid 9, h.232

⁵⁶ Sayyid Sabiq, Op.Cit, Jilid 7, h.77

nafkah.oleh karena itu,kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip harta dalam rumah tangga.

Suami wajib memberikan nafkah selama isteri taat kepada suami,jika isteri membangkang untuk taat maka suami tidak wajib untuk memberikan nafkah.⁵⁷

Dasar kewajiban terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadits Nabi SAW. Diantara ayat al-quran yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-baqarah (2) ayat

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili,Op.Cit,jilid 9,h..97

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. .”(QS.al-baqarah (2):233)⁵⁸

b. Kewajiban suami yang bersifat non materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut :

1. Menggauli isterinya secara baik dan patut, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.(QS.an-nisa : 19).⁵⁹

Maksud dari ayat diatas menerangkan bergaulah dengan mereka secara patut,yaitu menurut apa yang diperintahkan Allah SWT untuk berlaku baik, ini ditujukan untuk semua orang, suami atau wali, akan tetapi yang dimaksud dalam

⁵⁸ Departemen Agama RI,Op.Cit,h.57

⁵⁹ Departemen Agama RI,Op.Cit,h.119

hal ini adalah suami, seperti firman Allah SWT, yang artinya “maka rujuk dengan cara yang ma’ruf”.(QS.Albaqarah (2): ayat 229). Hal ini merupakan pemberian hak atas mahar dan nafkahnya, tidak boleh mencela terhadapnya tanpa ada alasan, dan berkata kasar ataupun keras.

2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.dalam ayat ini terkandung perintah untuk menjaga kehidupan beragama istri dan menjauhkan isterinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.

Tentang menjauhkan nya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari umum firman allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

r

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S.Al-Tahrim : 6).⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI,Op.Cit,h.448

3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawadah, rahmah, dan sakinah. Untuk maksud itu wajib memberikan rasa tenang bagi isterinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isterinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Rum (30) Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda kaum yang berfikir. (QS. al-Rum (30):21)⁶¹

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan Firman Allah SWT "dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri" adalah Allah telah menciptakan kepada kalian perempuan-perempuan yang kalian merasa tentram kepadanya. Maksud "mim anfusikum" adalah air dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawa yang Allah SWT ciptakan dari tulang rusuk Adam. Demikian pendapat yang dikemukakan

⁶¹ Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 324

oleh Qatadah dan alrahmah adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain.⁶²

b. Hak dan Kewajiban Isteri Terhadap Suami

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari isterinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi, kewajiban yang bersifat non materi itu adalah :

1. Tidak berpuasa sunnah kecuali seizin suami.

Termasuk hak-hak suami atas isterinya untuk tidak puasa tanpa seizin suaminya, walaupun ia melakukannya dengan rasa lapar dan haus, maka tidak akan diterima puasanya.

2. Istri wajib menetap di rumah.

Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal di rumah adalah sebagai hak suami kepadanya. Para ulama fiqih berpendapat bahwa keluarnya istri dari rumahnya dengan tanpa izinnya maka istri dianggap melanggar sehingga ia tidak mendapatkan nafkah.

3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam surat an-nisa' ayat 34 :

⁶² Pendapat ini disebutkan AN-Nuasha dalam Maa'ani Al- Quran (5/251) dan Al-Mawadi dalam tafsirnya (3/261). lihat *al-qurthubi, Op. Cit, Jilid, 14, h. 172*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. “(QS.al- Nisa’(4):34)⁶³

4. Tidak mengizinkan masuk kedalam rumah orang yang dibenci suaminya Hal ini untuk mencegah berbagai berbagai kerusakan dan menjauhkan kecurigaan yang menjadi penyebab hancurnya rumah tangga.
5. Memberikan kasih sayang dan sikap yang menyenangkan kepada suami dan menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatannya yang tidak disenangi oleh suaminya.

5. Tanggungjawab dan Penyelesaian Hutang Piutang

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum perjanjian umumnya, kekayaan seseorang merupakan jaminan atas hutangnya. Bahkan

⁶³ Departemen Agama RI, Op.Cit, h.123

dalam hukum Islam, seperti telah disinggung terdahulu, hutang tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan sepenuhnya dibebankan kepada kepada kekayaan si berutang sendiri, dan pada saat meninggal hak-hak kreditor didahulukan atas hak-hak penerima wasiat dan ahli waris. Konsekuensi yang diterangkan di atas bahwasanya seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas hutang-hutangnya, berkurang atau bertambahnya kekayaan debitur mengakibatkan berkurangnya atau bertambahnya jaminan bagi kreditor atas piutangnya.

Kecuali dalam satu hal, yaitu dalam keadaan sakit parah, menurut hukum Islam, semua orang yang cakap termasuk debitur adalah bebas untuk bertindak hukum atas kekayaan yang dimilikinya. Hal itu adalah karena salah satu sifat dari hak milik itu adalah adanya kebebasan penuh bagi pemilik untuk bertindak hukum terhadapnya. Namun demikian, dalam hukum perikatan Islam, untuk kepentingan kreditor, tindakan-tindakan hukum debitur harus dibatasi apabila ia mengalami suatu keadaan insolvensi (dalam kitab-kitab fikih disebut *al-iflash* atau *al-fals*). Debitur yang muflis (*insolven*) didefinisikan sebagai debitur yang beban hutangnya yang telah jatuh tempo dan belum jatuh tempo menyamai jumlah kekayaan baik krediturnya tunggal atau banyak.

Dalam hukum Islam, ada dua upaya hukum yang diberikan kepada kreditor untuk menghadapi debiturnya yang muflis (*insolven*), yaitu :

- a. Kreditor dapat *memfasakh* (membatalkan) tindakan debitur yang merugikan kreditor. Ini adalah asas hukum yang diterima dalam mazhab Maliki, sedang dalam mazhab –mazhab lainnya tidak dikenal.

b. Kreditur dapat mengajukan pengampunan atas tindakan debitur kepada hakim (*at-tahjir 'ala al-madin*), sehingga debitur tidak dapat melakukan tindakan hukum atas kekayaannya. Asas ini diterima secara umum dalam seluruh mazhab hukum Islam, kecuali abu hanifah yang menolak pengampunan atas debitur yang muflis (*insolven*).

Tindakan hukum yang dilakukan debitur dapat difasakh (dibatalkan) jika tindakan hukum debitur tersebut yang mengalami *insolvensi (iflas)* tetapi belum diumumkan pengampunannya oleh hakim. Apabila atas permintaan kreditur, debitur bersangkutan telah diumumkan berada dalam pengampunan atas tindakannya oleh hakim, maka tindakannya tidak sah atau batal demi hukum, dalam arti bukan dapat dibatalkan.⁶⁴

Hal ini didasari Bahwasanya dalam ketentuan hukum Islam untuk melakukan suatu perjanjian hutang piutang itu diharuskan menulis dan dipersaksikan pada saat perjanjian dilakukan, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁶⁵

Dalam permasalahan persengketaan, bahwasanya hukum Islam tidak menghendaki adanya permusuhan antara sesama muslim, dan dapat terjadi bila

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 281.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 70.

penyelesaian hutang piutang itu tidak sampai ke pengadilan. Sebagaimana firman Allah S.W.T. :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.’ (QS. al-Baqarah: 188)⁶⁶

Di dalam untuk menyelesaikan suatu persengketaan, bahwasanya hukum Islam di bidang muamalah menerapkan Konsep *Shulh* (perdamaian) yang merupakan sebagai doktrin utama dalam hukum Islam, dan ini sudah merupakan suatu kondisi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia.

Dalam usaha perdamaian ini pihak mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa atau beda pendapat di antara mereka dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis, namun jika mereka gagal mencapai kesepakatan, maka mereka menunjuk mediator untuk membantu menemukan pemecah masalah dengan hasil win-win solution.

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian adalah sangat cocok dan dianggap baik, karena dengan jalan musyawarah akan diketemukan jalan

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 46.

keluar untuk mengakhiri sengketanya, dengan tidak ada yang merasa dikalahkan sehingga para pihak sama-sama merasa puas dan terhindar dari rasa permusuhan.⁶⁷

Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian (*Shulh*) diantara pihak yang bersengketa ini dapat dilihat dalam al-Qur'an, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil'.(Qs. Al-Hujarat ayat 9)⁶⁸

Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 128 yang artinya:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: ...Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik....⁶⁹

⁶⁷ IKAHI, *Varia Peradilan* (Majalah Hukum Tahun Ke XXIII No.266 Januari 2008), 60.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 846.

⁶⁹ Ibid,143.

Mengenal ash shulh ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu :

a. Rukun *Ash Shulh*

Rukun ash shulh adalah : ijab dan qabul, dengan lafadz apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian.

Seperti ucapan si-terdakwa: Aku berdamai denganmu; kubayar hutangku padamu yang lima puluh dengan seratus. Dan pihak lain berkata: telah aku terima. Dapat pula dengan kalimat lain yang serupa dengan itu.

Apabila shulh telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya kerelaan pihak lain.

b. Syarat-syarat *Ash Shulh*

Syarat-syarat shulh ini ada yang berhubungan dengan mushalih bihi, dan ada pula yang berkaitan dengan mushalih ‘anhu. Untuk syarat mushalih, adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum.

Syarat-syarat mushalih bihi adalah :

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan atau berguna.
2. Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat tidak adanya kesamaran dan ketidak jelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: jika tidak memerlukan kepada penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat, mengetahui jelas seperti ini terhadapnya. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka damai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.⁷⁰

Dan syarat *mushalih 'anhu* ialah :

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilai atau barang yang bermanfaat. Dan tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
2. Bahwa ia termasuk hak manusia, yang boleh diwadhdkan (diganti) sekalipun bukan berupa harta, seperti qishos.

Adapun dalam kaitannya dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh shulh.⁷¹

Mengenai hal itu pembebanan permasalahan hutang piutang yang dibuat suami atau istri dalam perkawinan perlu ditinjau dari segi hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan

⁷⁰ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, 212-213.

⁷¹ Ibid, 217.

kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan istrinya.⁷²

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷³

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari kehidupan perkawinan adalah menciptakan ketenangan bagi jiwa, saling mencintai dan menyayangi.⁷⁴

Pada dasarnya, salah satu tanggung jawab suami adalah memberi nafkah kepada istrinya dan keluarganya, tanggung jawab ini dimaksud,⁷⁵ dijelaskan oleh Allah berdasarkan al-Quran surat an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 51.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644.

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, (Terjemahan Abdurrachman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti, 1993) 276

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 60

yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya karena Allah telah memelihara (mereka)...(QS. an-Nisa': 34).⁷⁶

Kata *qawwamun* adalah orang-orang yang memimpin, yang mengurus atau bertanggung jawab terhadap keluarganya yaitu para suami selama mereka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan karena dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Karena bahwasanya kaum laki-laki adalah pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.⁷⁷

Menurut Yusuf Qardhawi penjelasan al-qur'an di atas bahwasanya seorang suami harus memikul tanggung jawab yang berat, karena tugas seorang suami adalah memelihara dan melindungi keluarganya, serta dirinya dari api neraka. Sebagaimana kewajibannya memberi nafkah.⁷⁸

Firman Allah SWT dalam surah at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁷⁶ Ibid, 123

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, (Jakarta, Widya Cahaya, 2011),167

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*, 27

Artinya: Hai orang-orang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah (terdiri dari) manusia dan batu....(QS. at-Tahrim: 6)

Penjelasan ayat di atas bahwasanya suami bertanggung jawab atas tindakannya yang menyeret istrinya ke neraka, tidak membawanya ke surga. Bagi sang istri pun bertanggung jawab atas dirinya sendiri, karena sudah dianggap dewasa dan berakal.⁷⁹

Bahwasanya maksud dari tanggung jawab hutang piutang suami atau istri, suami selalu lebih dipertanggung jawabkan terhadap hutang yang diperbuat istrinya, akan tetapi jika suami yang berhutang maka istri juga dapat ikut dipertanggung jawabkan, disamping tanggung jawab suaminya, karena wajib bagi istri untuk menasehati suaminya, dengan berbagai cara, dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar*, karena demi tegaknya hukum atau syariat agama Islam dan ridha Allah SWT.⁸⁰

Rasulullah saw bersabda, bahwasanya hutang piutang harus diselesaikan secara baik :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, dari Nabi Muhammad Saw bersabda, Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghambuskannya, maka Allah akan merusaknya.(HR. Al-Bukhari).⁸¹

⁷⁹ Ibid, 298

⁸⁰ Ibid, 299

⁸¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram jilid II*, 431

Maksud dari hadis di atas menggunakan kata “mengambil harta orang lain” mencakup makna mengambilnya dengan cara hutang dan mengambilnya untuk menjaganya, dan menganjurkan agar tidak memakan harta orang lain, serta anjuran bersikap baik melunasi hutang.⁸²

Dalam hal ini penyelesaian pertanggungjawaban hutang, baik terhadap hutang suami maupun istri, bisa dibebankan pada harta masing-masing. Sedang terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta bersama tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi, maka dibebankan pada harta istri.⁸³

⁸² Ibid, 432.

⁸³ Tihami et al., *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 177.